



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 101 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN MEKARMUKTI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN MEKARMUKTI TAHUN 2023.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 101**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 101 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA
KECAMATAN MEKARMUKTI
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses Untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

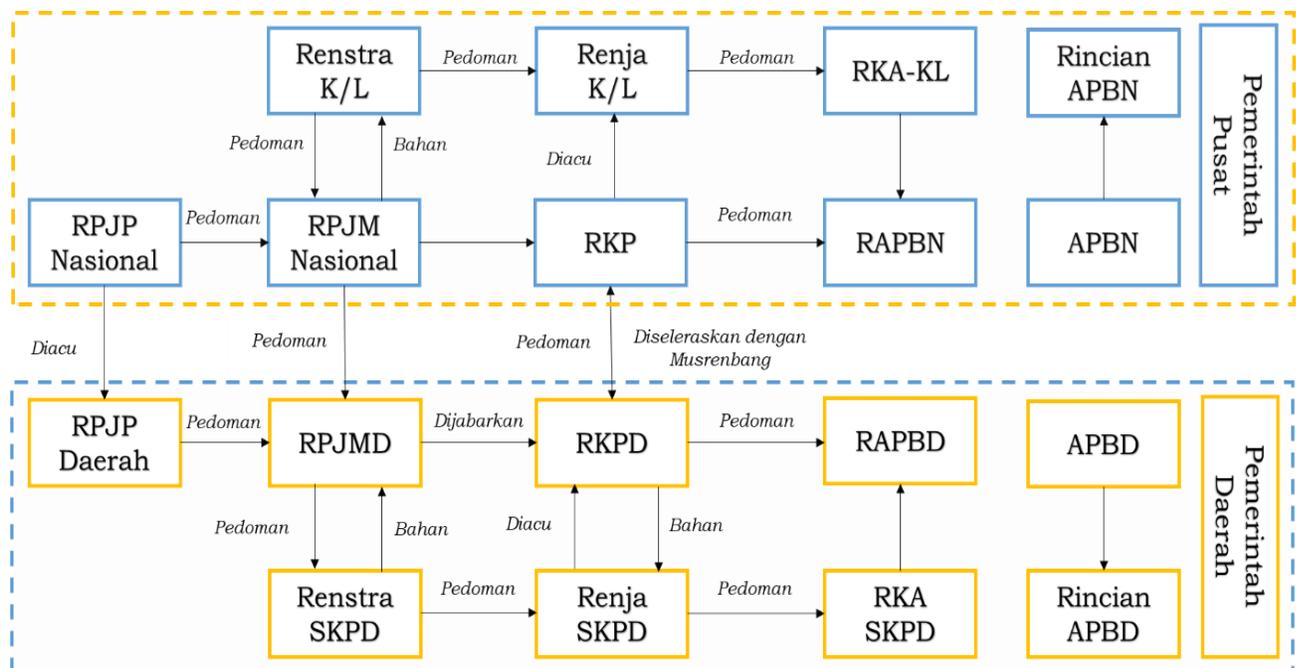
Dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.

Renja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan Renja, Penyusunan Rancangan Awala Renja, Penyusunan Rancangan Renja, Perumusan rancangan akhir sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 dikelola melalui Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

Gambar 1.1

Hubungan antara renja dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Tema Pembangunan 2023 “ **Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan daya saing daerah serta penguatan Demokrasi untuk kesejahteraan Masyarakat** “ Renja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023 berpedoman pada RKP Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKP dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberikan masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023 juga berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.

Renja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023 merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKP harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Sebagaimana dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah, Rencana Kerja diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dicapai (Achievable), dan tepat waktu (time-bound). Disamping itu, nilai

keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Renja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan Pengawasan.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menghadapi tantangan dalam penanganan pandemic COVID-19. Seperti yang kita ketahui, penyebaran pandemic COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia, dan hingga saat ini masih terdapat tanda-tanda penyebarannya. Pandemi COVID-19 tahun 2021 sudah terkendali pada level yang rendah, diharapkan mulai bisa lepas dari tekanan pandemic COVID-19. Oleh sebab itu arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 difokuskan pada upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemic COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman social dan penanggulangan pandemic COVID -19 secara komprehensif.

Penyusunan RKPD Tahun 2023 memuat pula gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (new normal) pasca COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya mencegah lonjakan kasus di masa depan. Msa epidemic saat ini telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi. Epidemik bukan hanya ujian, tetapi juga peluang baru. Asumsi yang dipergunakan dalam pembangunan daerah tahun 2023 yaitu:

- a. Masyarakat diharapkan sudah dapat hidup berdampingan dengan COVID-19 seiring dengan adanya vaksin, serta terbentuknya herd-immunity.
- b. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli.
- c. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optima,, serta upaya pemulihan ekonomi nasional sudah berjalan dengan baik, termasuk sudah kembali berjalannya proyek-proyek pembangunan infrastruktur
- d. Seluruh aktivitas masyarakat sudah berjalan normal namun tetap menerapkan protocol kesehatan pada semua lini (new normal).

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”**. Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan pelimpahan delegasi tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
12. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
13. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
14. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang terintegrasi dan bersinergi pada setiap lapis pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan setiap tahunnya maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tahun 2013, proses penyusunan Renja Kabupaten Garut Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan dan ditentukan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu “ **Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan daya saing daerah serta penguatan Demokrasi untuk kesejahteraan Masyarakat**’ yang diturunkan ke dalam Program dalam rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Garut dan pejabaran tahun ke empat dari rencana pembangunan jangka menengah, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD/Kecamatan dan sebagai bahan penyusunan RKPD/Renja Kabupaten Garut.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Mekarmukti tahun 2023

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 nomor 36);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mekarmukti tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Mekarmukti guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mekarmukti tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Mekarmukti;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Mekarmukti sudah disahkan.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

BAB III Tujuan dan Sasaran.

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Mekarmukti. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mekarmukti ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Mekarmukti selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Mekarmukti Tahun 2021 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yaitu :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 - b. Koordinator dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat kordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Mebel
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yaitu :
- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan
 - a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
3. Program Pemerdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan
- Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pemerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Yaitu :
- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa
 - 2) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Yaitu :
- 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat
- Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan pusat Yaitu :

1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mekarmukti 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

1) Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Mekarmukti dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 5 Program 13 Kegiatan 22 Sub Kegiatan terdapat 8 (sembilan) Sub Kegiatan (16,16%) yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi hasil/keluaran tidak memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (97,31)
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (91,87)
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (98)
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (80,82)
5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (75,76)
6. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (96,96)
7. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (97,64)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel
Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.385.000	73.362.055	97,31
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.385.000	73.362.055	97,31

2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.465.407.781	1.346.399.279	91,87
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.465.407.781	1.346.399.279	91,87
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	9.800.000	98
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	9.800.000	98
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.240.404	187.240.404	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.138.600	14.660.635	80,82
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	169.101.804	168.034.900	99,36
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.100.000	30.380.900	75,76
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.100.000	30.380.900	75,76
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	262.879.438	254.890.150	96,96
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	262.879.438	254.890.150	96,96
2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	21.145.000	20.645.000	97,63
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.145.000	20.645.000	97,63

Sumber : Pengolahan Data Kec, Mekarmukti 2022

- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Mekarmukti dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 5 Program 13 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan terdapat 14 (Lima Belas) sub Kegiatan (83,84%) yang target kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
8. Pengadaan Mebel
9. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
11. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
12. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
13. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
14. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Tabel
Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	344.247.300	344.247.300	100,00
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.839.700	10.839.700	100,00
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.839.700	10.839.700	100,00
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.817.700	186.817.700	100,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.124.000	21.124.000	100,00
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.448.600	34.448.600	100,00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.405.100	13.405.100	100,00
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.600.000	39.600.000	100,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.240.000	78.240.000	100,00

3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.649.500	120.649.500	100,00
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.650.000	70.650.000	100,00
2	Pengadaan Mebel	49.999.500	49.999.500	100,00
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.940.400	25.940.400	100,00
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.060.000	7.060.000	100,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.880.400	18.880.400	100,00
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	59.543.400	59.543.400	100,00
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.973.400	19.973.400	100,00
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19.973.400	19.973.400	100,00
2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	39.570.000	39.570.000	100,00
1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	39.570.000	39.570.000	100,00
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	141.890.000	141.890.000	100,00
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	141.890.000	141.890.000	100,00
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	141.890.000	141.890.000	100,00
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.360.000	19.360.000	100,00
1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.360.000	19.360.000	100,00
1	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	19.360.000	19.360.000	100,00

Sumber : : Pengolahan Data Kecamatan Mekarmukti tahun 2022

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Mekarmukti
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :
- a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, ada anggaran yang tidak terserap karena salah kode rekening;
 - b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
 - c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mekarmukti adalah sebagai berikut :
- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mekarmukti tahun 2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Mekarmukti pada umumnya.
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mekarmukti berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Mekarmukti
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Mekarmukti merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Mekarmukti selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.

Adapun capaian Renstra Kecamatan . Mekarmukti tahun lalu (tahun 2021) seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kete
a	B	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	76	Triwulan 1				
						Triwulan 2	76	82	100.72	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	76	81.75	100.93	
						Kondisi Akhir (F)		81.75	100.93	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	2.1	Predikat SAKIP Kecamatan	Predikat	CC	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	C	CC	100.00	
						Kondisi Akhir (F)		100	100.00	

Sumber : Data Pengelolaan Kecamatan Mekarmukti

Keterangan

Warna Prosentase Keterangan
 n/a Tidak Ada Target

Keterangan

Warna Prosentase Keterangan
 n/a Tidak Ada Target
 < 100% Tidak Tercapai
 = 100% Tercapai
 > 100% Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja Kecamatan Mekarmukti tahun 2021, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja predikat sakin kecamatan.
3. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator Sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 100, 93%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Mekarmukti Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2020-2021 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mekarmukti selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mekarmukti

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	Urusan Kewilayah									
7.01.	Kecamatan									
7.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	97%	100%	97%	97%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	97%	100%	97%	97%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan	100%	97%	100%	97%	97%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlahpembayaran Gajidan TunjanganASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.05.	Koordinasi danPenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporanKeuangan AkhirTahun SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	98%	100%	98%	98%	100%	100%	100%
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlahpengiriman ASNyang mengikutipendidikan danpelatihan PegawaiBerdasarkanTugas dan Fungsi	100%	98%	100%	98%	98%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah itemPenyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor	Jumlah peralatandan perlengkapankantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah PeralatanRumahnya Tangga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitas kunjungan tamu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah item Pengadaan Mebel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	97%	100%	97%	97%	100%	100%	100%

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah pembayarantagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	100%	81%	100%	81%	81%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	76%	100%	76%	76%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Operasional kendaraan dalam lingkungan Kantor Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	100%	76%	100%	76%	76%	100%	100%	100%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURA	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase desa yang berkinerja baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen RPTK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Prosentase desa yang berkinerja baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04.2.01.01	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	pelaksanaan Patroli	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan MTQ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase desayang berkinerja baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desayang berkinerja baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapandan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi penegakan perdati kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : SIPD tahun 2022

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Mekarmukti sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			76	77	78	79	76	77	78	77	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Predikat SAKIP Kecamatan			CC	B	B	BB	C	CC	B	B	

Sumber : Data SIPD tahun 2022

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian IBU;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kecamatan ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial*

Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Mekarmukti serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wilayah Kecamatan Mekarmukti (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi

daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Mekarmukti sebesar Rp. 5.968.437.589-.Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Mekarmukti diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2023 Kecamatan Mekarmukti mengusulkan 6 (enam) Program dengan 15 (Lima belas) kegiatan dan 41 (Empat Puluh Satu) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Mekarmukti mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Mekarmukti

NO					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et Capai an	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7					UNSUR KEWILAYAHAN				5.968.437.589	UNSUR KEWILAYAHAN				5.968.437.589
7	01				KECAMATAN				5.968.437.589	KECAMATAN				5.968.437.589
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Mekarmukti	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	5.044.006.881	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Mekarmukti	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	5.044.006.881
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	1 Laporan	86.697.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	1 Laporan	86.697.000
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	45.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	45.000.000

7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	29.697.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	29.697.000
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	7.500.000

7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 laporan	1.652.403.291	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 laporan	1.652.403.291
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	1.624.203.291	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	1.624.203.291
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	13.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	13.200.000
7	01	01	2,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	15.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	15.000.000
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		41.871.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		41.871.700
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 steal	17.591.700	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 steal	17.591.700
7	01	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	9.280.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	9.280.000

7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	15.000.000
7	01	01	2,06		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	254.059.900	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	254.059.900
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 PAKET	22.825.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 PAKET	22.825.000
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	64.994.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	64.994.000
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	33.047.400	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	33.047.400
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	23.493.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	23.493.500

7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1250 laporan	39.600.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1250 laporan	39.600.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 laporan	65.100.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 laporan	65.100.000
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1 laporan	2.803.420.650	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1 laporan	2.803.420.650
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	336.630.250	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	336.630.250
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	55.780.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	55.780.000
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	101.640.400	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	101.640.400

7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	2.309.370.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	2.309.370.000
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1 Laporan	95.017.810	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1 Laporan	95.017.810
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.142.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.142.000
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	8.480.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	8.480.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	54.395.810	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	54.395.810
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	110.536.530	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	110.536.530
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	90.536.530	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	90.536.530

7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 laporan 0 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 laporan 0 Unit	20.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mekarmukti	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100	337.430.708	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mekarmukti	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100	337.430.708
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan	312.430.708	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan	312.430.708
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan	141.186.910	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan	141.186.910

7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	171.243.798	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	171.243.798
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak	1 laporan	25.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak	1 laporan	25.000.000
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 laporan	25.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 laporan	25.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Mekarmukti	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	120.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Mekarmukti	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	120.000.000
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	70.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	70.000.000
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 lembaga	25.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	9 lembaga	25.000.000

											Desa			
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	45.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	45.000.000
7	01	03	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	1 laporan	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	1 laporan	50.000.000
7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 dokumen	50.000.000	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 dokumen	50.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Mekarmukti	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	255.500.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Mekarmukti	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	255.500.000
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	234.500.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	234.500.000
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 bulan	174.500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 bulan	174.500.000

7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	60.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	60.000.000
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	21.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	21.000.000
7	01	04	2.02	02	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	21.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	21.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Mekarmukti	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	172.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Mekarmukti	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	172.500.000
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	172.500.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	172.500.000

7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12 orang	17.500.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12 orang	17.500.000
---	----	----	------	----	---	----------------------	--	----------	------------	---	----------------------	---	----------	------------

7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 orang	55.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 orang	55.000.000
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	100.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	100.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Mekarmukti	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	39.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Mekarmukti	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	39.000.000
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Mekarmukti	Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	39.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Mekarmukti	Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	39.000.000
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 dokumen	25.500.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 dokumen	25.500.000
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangu Partisipatif	1 dokumen	13.500.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangu Partisipatif	1 dokumen	13.500.000
TOTAL									5.968.437.589					5.968.437.589

Sumber : Data SIPD tahun 2022

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Mekarmukti melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Mekarmukti mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 12.5berikut ini :

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mekarmukti

NO.	PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KERJA	BESARNYA VOLUME	CATATAN
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya (PKS-PK) (HOK)	Mekarmukti	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	1 Paket	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya	Mekarmukti	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	1 Paket	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya	Mekarmukti	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	1 Paket	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya	Mekarmukti	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	1 Paket	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

5	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya	Mekarmukti	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	1 Paket	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
6	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya	Mekarmukti	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	1 Paket	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
7	Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan Berbasis Masyarakat	Mekarmukti	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	1 Paket	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
8	Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan Berbasis Masyarakat	Mekarmukti	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	1 Paket	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
9	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya	Mekarmukti	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	1 Paket	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
10	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya	Mekarmukti	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	1 Paket	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

11	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya	Mekarmukti	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	1 Paket	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
12	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya	Mekarmukti	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	1 Paket	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
13	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
14	Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
15	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Perbaikan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
16	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Peningkatan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman

17	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
18	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
19	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
20	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
21	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
22	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Perbaiki Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman

23	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
24	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
25	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
26	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
27	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Peningkatan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
28	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman

29	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
30	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Pembangunan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
31	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Pembangunan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
32	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
33	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
34	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman

35	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
36	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
37	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
38	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
39	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
40	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman

41	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
42	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
43	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
44	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
45	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk Cegah Kumuh	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
46	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Pembangunan PJU Jalan	Jagabaya	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	1 Paket	Dinas Perumahan dan Permukiman

47	Pengembangan kebudayaan	Bantuan Alat Kesenian	Cijayana	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	1 Paket	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
48	Pengembangan kebudayaan	Bantuan Alat Kesenian	Cijayana	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	1 Paket	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
49	Pengembangan kebudayaan	Bantuan Alat Kesenian	Cijayana	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	1 Paket	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
50	Pengembangan kebudayaan	Bantuan Alat Kesenian	Cijayana	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	1 Paket	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
51		#BK Pengembangan Destinasi Wisata	Cijayana	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	1 Paket	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
52	Pengembangan kebudayaan	Bantuan Alat Kesenian	Cijayana	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	1 Paket	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

53		Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Cijayana	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
54		#BKDes Peningkatan Kualitas Jalan Desa Untuk Aktifitas Ekonomi (Pertanian dan Wisata)	Cijayana	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
55		#BKDes Peningkatan Kualitas Jalan Desa Untuk Aktifitas Ekonomi (Pertanian dan Wisata)	Cijayana	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
56		#BKDes Peningkatan Kualitas Jalan Desa Untuk Aktifitas Ekonomi (Pertanian dan Wisata)	Cijayana	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
57		#BKDes Peningkatan Kualitas Jalan Desa Untuk Aktifitas Ekonomi (Pertanian dan Wisata)	Cijayana	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
58		#BKDes Peningkatan Kualitas Jalan Desa Untuk Aktifitas Ekonomi (Pertanian dan Wisata)	Cijayana	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

59		Pembinaan Kader Dasawisma	Cijayana	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
60		Insentif Dasawisma	Cijayana	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
61		Hibah Uang (BUMDes)	Cijayana	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
62		Hibah Uang (BUMDes)	Cijayana	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
63		Hibah Barang (BUMDes)	Cijayana	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
64		Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW	Cijayana	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

65		Insentif Dasawisma	Cijayana	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
66		Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Cijayana	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
67		Pembinaan Kader Dasawisma	Cijayana	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
68		Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Cijayana	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
69		Pembinaan Kader Dasawisma	Cijayana	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
70		Insentif Dasawisma	Cijayana	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

71		Hibah Uang (BUMDes)	Cijayana	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
72		Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW	Cijayana	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
73		Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin)	Cijayana	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
74		Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Cijayana	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
75	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Pekarangan Pangan Lestari	Cijayana	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan
76		#HB Revitalisasi LPM (Lumbung Pangan Masyarakat)	Cijayana	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan

77	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Bantuan Sayuran dan Buah	Cijayana	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	1 Paket	Dinas Pertanian
78	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Cijayana	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	1 Paket	Dinas Pertanian
79	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	DAM Parit	Cijayana	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	1 Paket	Dinas Pertanian
80	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	DAM Parit	Cijayana	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	1 Paket	Dinas Pertanian
81	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Jalan Usaha Tani	Cijayana	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	1 Paket	Dinas Pertanian
82	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Jaringan Irigasi Usaha Tani	Cijayana	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	1 Paket	Dinas Pertanian

83	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Bantuan sarana produksi tanaman jagung	Cijayana	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	1 Paket	Dinas Pertanian
84	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Penangkaran Benih Padi	Cijayana	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	1 Paket	Dinas Pertanian
85	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Bantuan sarana produksi tanaman hortikultura (sayuran dan buah-buahan)	Cijayana	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	1 Paket	Dinas Pertanian
86	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Bantuan Sayuran dan Buah	Cijayana	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	1 Paket	Dinas Pertanian
87	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Jaringan Irigasi Usaha Tani	Cijayana	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	1 Paket	Dinas Pertanian
88	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Jalan Usaha Tani	Cijayana	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	1 Paket	Dinas Pertanian

89	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Peralatan Posyandu (Paket)	Cijayana	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	1 Paket	Dinas Kesehatan
90	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Peralatan Posyandu (Paket)	Cijayana	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	1 Paket	Dinas Kesehatan
91	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Peralatan Posyandu (Paket)	Cijayana	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	1 Paket	Dinas Kesehatan
92	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Peralatan Posyandu (Paket)	Cijayana	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	1 Paket	Dinas Kesehatan
93	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Peralatan Posyandu (Paket)	Cijayana	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	1 Paket	Dinas Kesehatan
94	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Peralatan Posyandu (Paket)	Cijayana	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	1 Paket	Dinas Kesehatan
95	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Peralatan Posyandu (Paket)	Cijayana	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	1 Paket	Dinas Kesehatan
96	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Peralatan Posyandu (Paket)	Cijayana	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	1 Paket	Dinas Kesehatan

97	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Peralatan Posyandu (Paket)	Cijayana	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	1 Paket	Dinas Kesehatan
98	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Peralatan Posyandu (Paket)	Cijayana	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	1 Paket	Dinas Kesehatan
99	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Suplai Makanan Bergizi Pencegahan Stunting	Cijayana	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	1 Paket	Dinas Kesehatan
100	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Bantuan sarana usaha peternakan domba	Cijayana	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	1 Paket	Dinas Perikanan dan Peternakan
101	Pengelolaan perikanan tangkap	Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	Cijayana	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	1 Paket	Dinas Perikanan dan Peternakan
102	Pengelolaan perikanan tangkap	Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	Cijayana	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	1 Paket	Dinas Perikanan dan Peternakan

103	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Pembangunan PJU Jalan	Cijayana	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	1 Paket	Dinas Perhubungan
104	Penanggulangan bencana	Bantuan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor dan Tsunami	Cijayana	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	1 Paket	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
105	Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pengadaan alat pemadama api ringan di tingkat masyarakat dan desa	Cijayana	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	1 Paket	Dinas Pemadam Kebakaran
106		Pelatihan dan bimbingan social bagi Keluarga	Cijayana	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	1 Paket	Dinas Sosial
107	Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Penghijauan Lahan Kritis	Cijayana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1 Paket	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : data dari SIPD Kab.Garut tahun 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahuan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahuan Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2022, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;
2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;

4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat.**

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta
4. Membangun komitmen seluruh stekholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Mekarmukti mempunyai tujuan :

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Yang Profesioanal dan Amanah

2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	78
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	100

	Kecamatan		Kecamatan		
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B

Sumber : Data SIPD Tahun 2022

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Mekarmukti merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Mekarmukti sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Mekarmukti diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Mekarmukti merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini

dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Mekarmukti diimplementasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Mekarmukti . Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 (PP di apdet?)

Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Mekarmukti diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Mekarmukti sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tangan (boboko,nyiru , aseupan dll), dibidang makanan seperti Sale, Opak, Wajit, Gula, tiktok, keripik Pisang dan kripik singkong dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti Pantai Cicalobak, Pantai Cibuhung, Hotel Cicula, Pantai Rancabolang, situ cikandang, Pantai Karangtepas, wisata panoongan.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Mekarmukti melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 41 (Empat Puluh Satu) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Mekarmukti sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Mekarmukti dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 5.968.437.589

Adapun Program Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Mekarmukti pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.3.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.3.2 Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.3.3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-DPA-SKPD
- 1.3.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.3.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.2.3 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

- 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.3.2 Monitoring Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai
- 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 1.4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.4.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.5.2 Pengadaan Mebel
 - 1.5.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - 1.5.4 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1.1 Koordinasi /Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
 - 2.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.3.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 3.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
 - 3.2 Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM)
 - 3.2.1 Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 4.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - 4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 4.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 5.1.2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - 5.1.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 6.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.1.2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel.3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Garut

Unit : 7,01.26 Kecamatan Mekarmukti
Organisasi : 7.01.26 Kecamatan Mekarmukti
Sub Unit : 7.01.26 Kecamatan Mekarmukti
Organisasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Progr am	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7		UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01	KECAMATAN											5.968.437.589		6.193.057.918		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											5.044.006.881		5.210.027.210	
7	01	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											86.697.000		86.797.000
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	1 dokumen	82 poin	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	45.000.000
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	1 Dokumen	82 poin	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.100.000

7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	1 Dokumen	82 poin	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3.500.000
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	3 Laporan	82 poin	29.697.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	29.697.000
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	1 laporan	82 poin	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	7.500.000
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.652.403.291					1.816.323.620
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	12 bulan	82 poin	1.624.203.291		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.786.623.620
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	1 dokumen	82 poin	13.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	13.200.000

7	01	01	2,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmu kti, Cijayana	100 %	1 dokume n	82 poin	15.000.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	16.500.000
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								41.871.700			41.871.700	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmu kti, Cijayana	12 bulan	25 steal	82 poin	17.591.700	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaia n di Kecamatan	12 bulan	17.591.700
7	01	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmu kti, Cijayana	12 bulan	1 dokume n	82 poin	9.280.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaia n di Kecamatan	12 bulan	9.280.000
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmu kti, Cijayana	12 bulan	3 Orang	82 poin	15.000.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaia n di Kecamatan	12 bulan	15.000.000
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								254.059.900			254.059.900	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Predikat SAKIP		100 %	10 PAKET	82 poin	22.825.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	22.825.000
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Predikat SAKIP		100 %	3 Paket	82 poin	64.994.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	100 %	64.994.000

7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Predikat SAKIP			100 %	1 Unit	82 poin	336.630.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	336.630.250
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Predikat SAKIP			100 %	5 Paket	82 poin	55.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	55.780.000
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Predikat SAKIP			100 %	15 unit	82 poin	101.640.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	101.640.400
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana		100 %	1 unit	82 poin	2.309.370.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.309.370.000
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								95.017.810						95.017.810
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana		100 %	12 Laporan	82 poin	32.142.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	32.142.000
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana		100 %	12 laporan	82 poin	8.480.000	Dana Transfer Umum-Dana		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah	100 %	8.480.000

							Disediakan							Alokasi Umum		Daerah di Tingkat Kecamatan		
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	1 laporan	82 poin	54.395.810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	54.395.810
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								110.536.530					112.536.530
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	10 unit	82 poin	90.536.530	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	90.536.530
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	1 laporan 0 Unit	82 poin	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	22.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								337.430.708					337.430.708
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								312.430.708					312.430.708
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Nilai SKM	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	12 laporan	77 %	141.186.910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	141.186.910

7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	4 dokumen	77 %	171.243.798	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	171.243.798
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							25.000.000				25.000.000	
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai SKM	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	6 laporan	77 %	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	25.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							120.000.000				70.000.000	
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							70.000.000				70.000.000	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	9 lembaga	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	25.000.000
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	1 laporan	100 %	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	45.000.000
7	01	03	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							50.000.000				0	

7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	1 dokumen	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	0
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								255.500.000		274.100.000		
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								234.500.000		251.000.000		
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	12 bulan	100 %	174.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	185.000.000
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan		100 %	12 Laporan	100 %	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	66.000.000
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								21.000.000		23.100.000		
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	1 laporan	100 %	21.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	23.100.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								172.500.000		272.500.000		
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								172.500.000		272.500.000		

7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	12 orang	100 %	17.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	17.500.000
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	50 orang	100 %	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	55.000.000
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	1 dokumen	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	200.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							39.000.000				29.000.000	
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							39.000.000				29.000.000	

7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	4 dokumen	100 %	25.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	15.500.000
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangu Partisipatif	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	1 dokumen	100 %	13.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	13.500.000
TOTAL													5.968.437.589		6.193.057.918		

Sumber : data SIPD tahun 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 41 (Empat puluh Satu) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut sebesar Rp. 5.968.437.589.- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 5.044.006.881 ,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Mekarmukti

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

- Masukan : Jumlah Dana Rp. 86.697.000,-
- Keluaran : 1. Jumlah dokumen Perencanaan
2. Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
4. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
5. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Mekarmukti

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.652.403.291,-
- Keluaran : 1. Jumlah Orangyang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
2. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
3. Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Mekarmukti

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 41.871.700,-
- Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Mekarmukti

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 254.059.900,-

Keluaran : 1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
3. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
4. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
6. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
7. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Mekarmukti

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 2.803.420.650,-

Keluaran : 1. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.
2. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
3. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang

Disediakan

4. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Mekarmukti

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 95.017.810,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Mekarmukti

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 110.536.530,-

Keluaran : 1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Mekarmukti

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 337.430.708,-
Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.
Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 77 (Baik)
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Mekarmukti

2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 312.430.708

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
2. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 77 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Mekarmukti

2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 25.000.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 77 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Mekarmukti

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang

dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

- Masukan : Jumlah Dana Rp. 120.000.000
- Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
- Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 100%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Mekarmukti

3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 70.000.000,-
- Keluaran : 1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2. Jumlah Laporan peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 100%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Mekarmukti

3.2 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

- Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 50.000.000,-
- Keluaran : Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 100%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Mekarmukti

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 255.500.000,-
- Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 100

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Mekarmukti

4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 155.849.100,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 100

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Mekarmukti

4.2 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 21.000.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 100

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Mekarmukti

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan

Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 172.500.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 100

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Mekarmukti

5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 172.500.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

3. Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 100

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Mekarmukti

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 39.000.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 100

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Mekarmukti

6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 39.000.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangu Partisipatif

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 100

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Mekarmukti

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 5.968.437.589,- (Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Sembilan Rupiah)

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah yang di imlementasikan ke dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Mekarmukti. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan.

BAB V P E N U T U P

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renja Kecamatan Mekarmukti mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja kecamatan Mekarmukti menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Mekarmukti melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN